



KEBIJAKAN LAYANAN PADA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG DUDUK DI KURSI RODA

SERVICE POLICY IN THE LIBRARY OF INDONESIA EDUCATION UNIVERSITY FOR DISABILITIES THAT ARE SEATED IN WHEEL SEATS

Oleh:

Euis Rosinar

Hada Hidayat Margana

Damayanty

Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia

nanarosinar@upi.edu

doi.org/10.17509/edulib.v10i1.23993

Abstract

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) is one of the universities, which pioneered inclusive education in Indonesia that accepts students with special needs, including students with physical disabilities, visual impairments, emotional barriers, and speech barriers. To support the teaching and learning activities of students with special needs, UPI needs to pay attention and provide learning facilities that support the accessibility of students with disabilities, which include the task of the library to provide the necessary facilities. All UPI students automatically become members of the library and have the right to use the library collection, including disabled students. In the 2016-2020 UPI Strategic Plan, libraries as academic support have not yet received a portion in terms of physical facilities, access to the library and information services for disabled students. Seeing this phenomenon, the main problems examined in this study were formulated as "What is the library service policy for persons with disabilities in the UPI Library?" This research was conducted with the aim of developing a library service policy for persons with disabilities at the UPI Library. Descriptive method is used in this study with quantitative and qualitative (mixed) approaches. Respondents in this study were students of the Graduate School of Special-Education Studies program, and students with disabilities as informants. The results of this study are that the Indonesian Education University Library has developed a service policy for persons with disabilities who are in wheelchairs based on the facilities analyze, but for the availability of information services, accessibility to the library, accessibility to / between spaces in the library, and accessibility of library facilities and facilities for borrowing services in the library for people with disabilities who sit in wheelchairs does not meet the needs of people with disabilities who sit in wheelchairs.

Keywords: disability, special needs, disability, service policy, accessibility.

Article Info

Naskah Diterima :
2020-4-9

Naskah Direvisi:
2020-4-25

Naskah Disetujui:
2020-5-27

Abstrak

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu universitas yang memelopori pendidikan inklusi di Indonesia yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus termasuk mahasiswa dengan hambatan fisik, hambatan penglihatan, hambatan

emosi, dan hambatan berbicara. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar para mahasiswa berkebutuhan khusus tersebut, UPI perlu memperhatikan dan menyediakan fasilitas belajar yang mendukung aksesibilitas mahasiswa difabel yang diantaranya merupakan tugas perpustakaan untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan. Seluruh mahasiswa UPI secara otomatis menjadi anggota perpustakaan dan berhak memanfaatkan koleksi perpustakaan termasuk tidak terkecuali mahasiswa difabel. Dalam Renstra UPI 2016-2020, perpustakaan sebagai penunjang akademik belum mendapat porsi dalam hal fasilitas fisik, akses masuk menuju ke perpustakaan serta layanan informasi bagi mahasiswa difabel. Melihat fenomena ini, permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai “Bagaimanakah kebijakan layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas pada Perpustakaan UPI?”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan kebijakan layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas pada Perpustakaan UPI. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan (mixed) kuantitatif dan kualitatif. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana program Studi Pendidikan Khusus, dan mahasiswa penyandang disabilitas sebagai informan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia telah mengembangkan kebijakan layanan bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda berdasarkan hasil analisa fasilitas, namun untuk ketersediaan informasi layanan, aksesibilitas menuju perpustakaan, aksesibilitas menuju/ antar ruang dalam perpustakaan, dan aksesibilitas fasilitas perpustakaan dan sarana layanan peminjaman dalam perpustakaan bagi pemustaka penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda.

Kata Kunci : disabilitas, berkebutuhan khusus, difabel, kebijakan layanan, aksesibilitas.

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan perguruan tinggi tidak hanya menerima mahasiswa dengan fisik normal tetapi juga menerima mereka yang mempunyai masalah ketunaan. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sebagai universitas yang mempelopori pendidikan inklusi di Indonesia, menerima mahasiswa berkebutuhan khusus termasuk mahasiswa dengan hambatan fisik, hambatan penglihatan, hambatan emosi, dan hambatan berbicara. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UPI harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah perpustakaan.

Dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pada bab 1, pasal 1, ayat 1 disebutkan bahwa “perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara

profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”. Ini berarti bahwa seluruh pemustaka berbagai kalangan berhak mendapat perlakuan yang sama selama berada di perpustakaan.

Mahasiswa UPI secara otomatis menjadi anggota perpustakaan dan berhak mempergunakan perpustakaan termasuk mereka yang mempunyai masalah ketunaan. Dalam Renstra UPI 2016-2020, perpustakaan sebagai penunjang akademik belum mendapat porsi dalam hal fasilitas fisik, akses masuk menuju ke perpustakaan serta layanan informasi. Melihat fenomena ini, perlu dikaji bagaimana kebijakan layanan untuk memberikan aksesibilitas di Perpustakaan UPI bagi pemustaka berkebutuhan khusus. Penyediaan fasilitas akses yang memadai bagi penyandang ketunaan akan membantu

mereka dalam memperoleh hak untuk dapat mengakses berbagai sumber informasi di perpustakaan.

Permasalahan umum dan tujuan yang menjadi sorotan dalam artikel ini diantaranya a) kondisi ketersediaan informasi layanan (layanan komunikasi) bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda pada Perpustakaan UPI. b) kondisi aksesibilitas (akses fisik/ *physical access*) menuju perpustakaan bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda pada Perpustakaan UPI. c) kondisi aksesibilitas (akses fisik/ *physical access*) menuju/ antar ruang dalam perpustakaan bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda pada Perpustakaan UPI. d) kondisi Aksesibilitas (akses fisik/ *physical access*) fasilitas perpustakaan dan sarana layanan peminjaman dalam perpustakaan bagi pemustaka yang duduk di kursi roda pada Perpustakaan UPI. dan e) rekomendasi kebijakan layanan bagi disabilitas yang duduk di kursi roda pada Perpustakaan UPI

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penyandang Disabilitas

Pengertian penyandang disabilitas disebutkan di dalam UU No. 4 tahun 1999 yaitu, “penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental”

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 tahun 2013 dalam bab umum disebutkan bahwa: “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau-pun sensorik

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang mendapatkan ketidakseimbangan antara kondisi fisiknya dengan lingkungan sosialnya. Pada banyak kasus, seseorang dengan kondisi disabilitas belum terakomodir kebutuhannya, termasuk oleh lingkungan sekitar perpustakaan. Ketidakterpenuhinya kebutuhan aksesibilitas kaum disabilitas oleh lingkungan tersebut menjadi salah satu inti pembicaraan dalam konvensi tentang hak penyandang disabilitas.

Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006 akhirnya dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. Untuk menghormati hak penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia turut menandatangani konvensi tersebut pada tahun 2007. Dalam kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak kaum disabilitas, pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang berkenaan dengan kaum disabilitas, yaitu [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011](#). Dalam UU tersebut, hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi “Negara-negara pihak mengakui hak

penyandang cacat atas pendidikan” ([Ridwan, 2015](#)).

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan Tinggi

Hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1, Ayat 4 yang menyebutkan bahwa: *“aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang ketunaan guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”*. Bangunan yang ada harus memberi kemudahan akses dengan menyediakan kelengkapan prasarana dan sarannya bagi mereka yang akan memasuki suatu bangunan gedung. Hal ini tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2002, Pasal 27, Ayat 1 yang berbunyi *“Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung”*. Bangunan gedung yang ada dengan segala prasarana dan sarannya seyogyanya dimanfaatkan bagi siapa saja, termasuk kaum penyandang ketunaan, lebih detail dituangkan dalam Pasal 27, Ayat 2 yakni *“Kemudahan hubungan ke, dari, dan didalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia”*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang ketunaan guna mewujudkan kesamaan

kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dimana kemudahan tersebut meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung berupa tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Aksesibilitas merupakan salah satu poin penting dari prinsip umum konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam [UU RI No. 19 tahun 2011](#). Pada pembukaan Undang-undang RI tersebut disebutkan bahwa negara-negara pihak yang merumuskan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas menyatakan sebagai berikut: *“Mengakui pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.”*

Untuk mendukung kelancaran aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, perlu diperhatikan rancangan lingkungan dan bangunan. Rancangan tersebut menggunakan pendekatan universal design. Menurut [Center for Universal Design \(CUD\)](#) dalam [Soleh \(2016, hlm. 55-56\)](#) ([Soleh, 2016](#)) desain universal adalah desain produk dan lingkungan untuk dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin tanpa perlu adaptasi atau rancangan khusus. Desain universal menggambarkan konsep tentang cara merancang produk dan lingkungan yang dibangun agar

menjadi estetis dan dapat digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang terlepas dari usia, kemampuan atau status kehidupan. Desain universal adalah suatu pendekatan terhadap desain produk dan lingkungan, termasuk instruksi, yang memperhitungkan berbagai kemampuan, kecacatan, latar belakang, ras dan etnis, kemampuan membaca, usia, dan karakteristik lain dari tubuh manusia.

Undang-undang dan peraturan menteri diakomodir dan diadopsi oleh setiap daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) termasuk Provinsi Jawa Barat. Perda Provinsi Jawa Barat No. 7 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam Bab V tentang aksesibilitas bagian satu menyebutkan bahwa: “*Penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum*”. Penyediaan aksesibilitas tersebut termasuk aksesibilitas pada fisik bangunan gedung.

Aksesibilitas yang ada di setiap gedung harus dapat dicapai dan dipergunakan oleh setiap orang dengan memperhatikan keselamatan dengan cara mandiri sehingga setiap orang, termasuk kaum disabilitas, dapat melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena alasan tersebut, setiap bangunan yang ada yang diperuntukkan bagi publik harus menerapkan empat faktor utama seperti yang tertuang dalam Kepmen PU Nomor 468 Tahun 1998 yaitu: kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Pengondisian bangunan gedung yang aksesibel

sesuai standar bangunan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum yaitu mulai dari kamar mandi, tangga, ruang perpustakaan, jalur pedestrian, selasar/ *ramp*, dan tempat parkir.

Library for All

[Irvall & Nielsen \(2005\)](#) menyatakan bahwa pada beberapa negara, akses terhadap penyandang disabilitas masih belum memiliki kesamaan dalam hal mendapatkan layanan perpustakaan. Oleh karena itu perlu untuk meninjau kembali kondisi fisik gedung perpustakaan, layanan, dan programnya. *International Federation of Library Association and Institutions (IFLA) Standing Committee of Libraries Serving Disadvantaged Person* (LSDP) dalam [Irvall dan Nielson \(2005\)](#) mengembangkan sebuah *practical tool* yang dapat digunakan oleh berbagai jenis perpustakaan dalam mengukur aksesibilitas untuk pemustaka yang memiliki disabilitas. Dalam *checklist access to libraries for persons with disabilities* yang dikembangkan oleh IFLA ini meliputi tiga hal yaitu: 1) *Physical Access*; 2) *Media Formats*; 3) *Service and Communication*.

Dalam jurnal IFLA yang dikutip oleh [Isrowiyanti \(2014\)](#) disebutkan bahwa beberapa sarana yang diperlukan untuk layanan yang aksesibel bagi pemustaka difabel dapat berupa *talking books, talking newspapers, talking periodicals, large print books, video/DVD books with subtitles and/or sign language, tactile picture books*. Layanan aksesibilitas bagi difabel rungu dapat berupa menyajikan instruksi layanan dengan bahasa isyarat melalui video, layanan via email, sms, dan informasi melalui

website perpustakaan. Intinya adalah bahwa semua informasi layanan perpustakaan hendaknya dapat diketahui oleh seluruh pemustaka difabel.

Aksesibilitas Fisik dan Non Fisik Bagi Difabel yang Duduk di Kursi Roda pada Perpustakaan

Aksesibilitas fisik di perguruan tinggi meliputi bangunan gedung, tempat parkir, toilet, jalur pedestrian, ruang pimpinan, ruang administrasi, dan fasilitas pendidikan yang lain sebagai media pembelajaran. Pada Perpustakaan aksesibilitas fisik bagi difabel yang duduk di kursi roda dibedakan menjadi aksesibilitas pada bagian luar perpustakaan dan aksesibilitas pada bagian dalam perpustakaan.

1) Aksesibilitas pada Bagian Luar Perpustakaan

Perpustakaan harus dengan mudah dapat dijangkau oleh kaum disabilitas. Dengan demikian perpustakaan harus memberikan akses yang mudah dan aman. Jika pintu utama tidak memberikan akses yang mudah, akses kedua/khusus harus tersedia dengan menyediakan kemudahan. IFLA (*International Federation of Library Associations and Institutions*) menegaskan "*If the main entrance cannot be made accessible, a secondary accessible entrance should be provided, equipped with automatic door opener, a ramp, and a telephone*".

Fasilitas akses masuk menuju gedung perpustakaan bagi kaum disabilitas harus memenuhi kriteria berikut:

1. *Clear and easy to read signposting;*
2. *Unobstructed and well lighted access paths to the entrance;*

3. *Smooth and non-slip surface at the entrance;*

4. *Railings at both sides of ramp.*

2) Aksesibilitas pada Bagian Dalam Perpustakaan (Jalur Masuk ke Perpustakaan dan Akses dalam Ruang Layanan Perpustakaan)

Kaum disabilitas yang duduk di kursi roda setelah melewati pintu masuk utama harus melewati *check point* untuk masuk ke ruang layanan. Ketentuan IFLA adalah sebagai berikut:

1. *Sufficient space in front of the door to allow a wheelchair to turn around;*

2. *Entrance door wide enough to allow wheelchair to enter;*

3. *No doorsteps – for easy wheelchair access;*

4. *Security checkpoints possible to pass through with a wheelchair.*

Keleluasaan akses merupakan kunci bagi layanan terhadap siapapun tanpa mengenal perbedaan kondisi fisik pemustaka. Untuk bisa masuk ke ruang pelayanan, pemustaka Perpustakaan UPI harus memasukkan identitas dengan cara melakukan *scanning* KTM pada *scanner* yang tersedia. *Scanner* harus diletakkan pada tempat yang juga terjangkau oleh mereka yang duduk di kursi roda.

Untuk memastikan data pemustaka yang duduk di kursi roda terdata di basis data, pemustaka bisa memastikannya dengan melihat data pada layar monitor yang tersedia di sebelah *scanner*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Adapun Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket, wawancara, observasi, serta studi dokumentasi/

literatur. Hal ini dilakukan dengan harapan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan kebijakan layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda pada Perpustakaan UPI. Penyebaran angket dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi subjek penelitian (Moleong, 2007).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis SWOT, untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki, kelemahan, peluang dan tantangan apa saja yang dapat mendukung atau mempengaruhi layanan sehingga dapat dirumuskan kebijakan layanan pada Perpustakaan UPI dalam hal aksesibilitas bagi disabilitas yang duduk di kursi roda.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana (SPS) program Studi Pendidikan Khusus yang masih aktif studi pada tahun 2018 sebanyak 110 mahasiswa SPs Pendidikan Khusus S2 dan S3 angkatan 2015 sampai angkatan 2018, dan satu orang mahasiswa penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda dari Prodi Psikologi UPI Angkatan 2015. Latar belakang pemilihan subjek penelitian ini karena mahasiswa SPs. Program Studi Pendidikan khusus dianggap memiliki pengetahuan tentang kebutuhan para penyandang disabilitas. Informan untuk pendekatan kualitatif adalah mahasiswa yang memiliki disabilitas

yang duduk di kursi roda serta pimpinan Perpustakaan UPI. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh subjek penelitian, dan sampel diambil dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Menurut Riduwan (2010), *simple random sampling* yaitu, "...cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut." Hal ini dilakukan apabila anggota populasinya homogen (sejenis).

Jumlah sampel yang diambil dihitung menggunakan rumus dari Taro Yamane sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

(Riduwan, 2010, hlm. 65)

Dimana:

n = Jumlah sampel,

N = Jumlah populasi,

d² = presisi yang ditetapkan sebesar 10%.

$$n = \frac{110}{110(0.1)^2 + 1} = \frac{110}{2.1} \approx 52.380 \approx 53 \text{ orang}$$



Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 53 orang.

Instrumen Pengumpul Data

Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini yaitu angket dan pedoman wawancara. Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden penelitian. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Kisi-kisi instrumen penelitian ini tertera sebagai berikut ini:

Tabel 1.
Kisi-kisi instrumen penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Pernyataan No.
Kebijakan layanan pada Perpustakaan UPI bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda (Irvall dan Nielsen, 2005) (Variabel X)	Ketersediaan Informasi Layanan bagi Mahasiswa yang duduk di Kursi Roda (<i>Service and Communication</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi melalui Rambu Petunjuk ▪ Informasi melalui Staf ▪ Informasi melalui web 	1 s.d. 3
	Aksesibilitas menuju perpustakaan bagi mahasiswa yang duduk di kursi roda (<i>Physical Access</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pedestrian ▪ <i>Ramp</i> ▪ Jalan datar ▪ <i>handrail</i> 	4 s.d. 7
	Aksesibilitas menuju/ antar ruang dalam perpustakaan bagi mahasiswa yang duduk di kursi roda (<i>Physical Access</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>ramp</i> ▪ lantai datar ▪ <i>handrail</i> ▪ pintu 	8 s.d. 11
	Aksesibilitas fasilitas perpustakaan dan sarana layanan peminjaman dalam perpustakaan bagi pemustaka yang duduk di kursi roda (<i>Physical Access</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ toilet ▪ lift ▪ jarak antar rak ▪ jarak antar meja baca ▪ Tinggi meja OPAC ▪ Tinggi meja MPS ▪ Tinggi meja sirkulasi 	12 s.d. 18

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aksesibilitas Bagian Luar Perpustakaan

Untuk dapat masuk ke gedung Perpustakaan UPI, pemustaka harus terlebih dahulu melalui tangga yang terdiri dari dua tingkat. (Gambar 1). Tangga tingkat bawah dengan jumlah 8 anak tangga dan tangga level atas berjumlah 6 anak tangga. Tangga masuk ke dua tingkat ini dipisahkan

oleh lantai landai sebagai jeda tangga (Gambar 2).

Pintu masuk utama gedung perpustakaan terdiri dari dua pintu yang terbuat dari kaca berkusen kayu. Pintu utama tersebut merupakan pintu tradisional. Dari dua pintu yang ada, hanya satu pintu yang dipergunakan sebagai akses masuk dan keluar perpustakaan sedang pintu lainnya terkunci dan tidak difungsikan.

Tabel 2
Dimensi Tangga Masuk dan Pintu Masuk Utama Gedung Perpustakaan UPI

No.	Area	Ukuran
1	Pintu Utama Perpustakaan (2 daun pintu)	Tinggi: 210 cm Lebar: 180 cm
2	Tangga menuju Perpustakaan	Setiap anak tangga: Tinggi: 20 cm Lebar: 40 cm

(Jovanca, 2009)



Gambar 1.
Tangga menuju akses pintu utama
Perpustakaan UPI



Gambar 2.
Lantai landai pemisah antara tangga pada level 1 dan level 2

Posisi Perpustakaan UPI yang lebih tinggi dari jalan dengan kontur tanah yang tidak rata dan sempit karena tepat di ujung jalan utama mobil membuat akses ke perpustakaan menjadi agak terkendala. Untuk membuat ruang agar kaum disabilitas

diatas kursi roda dapat menjangkau perpustakaan walaupun dengan bantuan teman, tahun 2014 Perpustakaan menambahkan *ramp* di salah satu sisi pada tangga di kedua tingkat.



Gambar 3
Ramp pada salah satu sisi tangga di kedua level

Dari pengamatan yang dilakukan, *ramp* yang ada sering dipergunakan oleh pemustaka dengan

kondisi fisik normal dan tak sedikit dari mereka yang terpeleset dan bahkan jatuh. Hal ini dikarenakan kemiringan

ramp yang ada di tangga masuk Perpustakaan UPI sebesar 35° (lebih dari kemiringan standar yakni 6°). Permukaan *ramp* halus tetapi masih

menyebabkan *slip*, hal ini tidak sesuai dengan rekomendasi dari IFLA yang menyebutkan bahwa "... *ramp is smooth and non-slip surface*".

Tabel 3

Dimensi *Ramp* dan Lantai Datar Antara Tangga pada Perpustakaan UPI

No.	Area	Ukuran	Keterangan
1	<i>Ramp</i>	Panjang : 320 cm. Lebar : 18 cm. Kemiringan : 35°	<i>Ramp</i> atas dan bawah
2	Lantai Datar Bawah	Penjang : 458 cm Lebar : 18 cm	
3	Lantai Datar Atas	Panjang : 558 cm. Lebar : 138 cm.	Dari akhir <i>ramp</i> menuju pintu masuk

Dengan kondisi *ramp* yang terlalu miring, tidak cukup lebar, tanpa *handrail* di samping luar, dan permukaan yang licin akan berbahaya bagi kaum disabilitas dan pendamping yang mendorong kursi roda. Sehingga penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda yang akan ke perpustakaan lebih banyak di "gendong" saat masuk ke perpustakaan. Selain itu, lantai datar bagian atas tidak cukup lebar dan panjang bagi kaum disabilitas yang duduk di kursi roda untuk berputar karena tidak disediakan ruang datar

yang memadai setelah akhir *ramp*. Disamping itu sisi kanan lantai datar tidak dilengkapi dengan penahan, hal ini sangat riskan bagi pemustaka yang duduk di kursi roda saat akan menuju pintu utama.

Pintu utama yang berdimensi 180 cm terdiri dari dua pintu hanya dibuka satu pintu untuk lalu-lintas keluar masuk perpustakaan. Ukuran 60 cm tidak cukup lebar bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda untuk melewatinya, dan lalu-lintas yang ramai akan sangat menyulitkan.



Gambar 4.

Pintu akses masuk dan keluar Perpustakaan UPI

Aksesibilitas Bagian Dalam Perpustakaan UPI

Setelah melewati pintu utama UPI yang hanya dibuka satu pintu dengan ukuran yang kecil, pemustaka

dengan kebutuhan khusus yang duduk di kursi roda harus melewati *check point*. Sebelum melalui *check point*, kaum disabilitas di kursi roda harus mengganti tas yang dibawa dengan tas

transparan yang telah disediakan oleh perpustakaan untuk membawa barang-barangn berharga mereka. Meja petugas locker dan tas terdiri dari meja panjang dimana terdapat buku daftar peminjam locker. Untuk dapat menggunakan locker, pemustaka harus terlebih dahulu meminjam kunci

locker dengan menuliskan data mahasiswa pada buku yang telah disediakan. (Gb. 5 dan 6.). Setelah menerima kunci, pemustaka menuju ke locker dimaksud dengan melewati akses masuk dan keluar melalui akses keluar yang telah disediakan.



Gambar 5.
Meja petugas locker

Akses masuk dan keluar ruang locker merupakan akses terbuka dengan dimensi ukuran 111 cm dan keluar melewati akses keluar dengan dimensi ukuran 62 cm. Kedua akses menuju ruang

penyimpanan tas dan barang sedemikian sempit sehingga tidak memberi ruang gerak yang bebas kepada para penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda.



Gambar 6.
Akses ke ruang locker

Untuk dapat masuk ke ruang utama perpustakaan, pemustaka harus melewati *check point* yang berada satu lokasi dengan meja informasi. Meja *check point* merupakan meja melingkar dengan dimensi ketinggian 110 cm. Pada meja *check point* tersedia mesin pemindai dan monitor untuk menampilkan data pemustaka yang masuk ke perpustakaan. Mesin

pemindai sendiri berukuran tinggi 5 cm sehingga bila ditotal dengan ketinggian meja menjadi 115 cm. Mesin pemindai sudah sesuai dengan ukuran standar maksimal jangkauan untuk kaum disabilitas yang duduk di kursi roda yaitu setinggi 130 cm. Untuk dapat mengetahui apakah data pemustaka telah terdata, disediakan monitor diatas meja yang bersebelahan dengan mesin

pemindai. Ukuran tinggi monitor diatas meja *check point* adalah 146 cm. Peletakan peralatan monitor telah

memenuhi standar yang disarankan yaitu 175 cm.



Gambar 7.
Meja *check point*

Sebelum mencapai ruang utama, setelah melakukan pengecekan identitas, pemustaka harus melewati pintu masuk. Pintu masuk yang ada berupa ruang kosong antara pilar dan meja informasi. Pintuk masuk cukup lebar untuk bisa dilewati kursi roda

dengan ukuran standar, sedangkan pintuk keluar berupa *security gate* dengan ukuran lebar 64 cm. Meskipun *security gate* cukup untuk dilewati oleh kursi roda dengan ukuran kecil, masih terlalu sempit untuk dapat dilewati kursi roda dengan ukuran standar.



Gambar 8.
Pintu masuk dan keluar

Menurut mahasiswa penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda, sarana aksesibilitas fisik menuju ke gedung perpustakaan bagi mahasiswa (pemustaka) difabel/penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda untuk jalur pedestrian menuju ke Perpustakaan tidak menjadi masalah dan dapat dihadapi dengan jalan sendiri, kecuali untuk melewati undakan-undakan

menuju ke Perpustakaan harus dibantu oleh orang lain. Mengenai aksesibilitas menuju perpustakaan bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda, Kepala Perpustakaan menyatakan bahwa Perpustakaan telah memfasilitasi akses ke gedung perpustakaan dengan membuat jalan khusus bagi disabilitas yang duduk di kursi roda. Hal ini dilakukan karena pemustaka yang datang ke

Perpustakaan UPI berasal dari berbagai kalangan secara fisik. Mengenai kesesuaian akses menuju gedung perpustakaan dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda, Kepala Perpustakaan menyatakan bahwa akses khusus yang disediakan perpustakaan menyesuaikan dengan desain gedung yang telah ada. Meskipun akses menuju gedung tersebut untuk para pemustaka penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda agak sedikit curam, dengan bantuan staf, maka para pemustaka tersebut dapat dibimbing masuk ke gedung perpustakaan.

Kemudian Bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda, keberadaan papan dan rambu petunjuk di Perpustakaan UPI masih dapat dibaca dan tidak ada masalah, layanan staf Perpustakaan UPI bagus dan petugasnya ramah-ramah, serta tidak ada masalah dengan penelusuran karena ada komputer di ruang multi media yang bisa dipergunakan terkait layanan informasi melalui web. Pimpinan Perpustakaan UPI tidak membuat layanan informasi khusus bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda karena perpustakaan tidak membedakan layanan informasi berdasarkan kriteria fisik, tetapi berdasarkan kebutuhan informasi menyediakan informasi yang tersedia sama sesuai kebutuhan dibutuhkan semua pemustaka pada umumnya.

Bagi pemustaka/ mahasiswa yang duduk di kursi roda, aksesibilitas fasilitas perpustakaan dan sarana layanan peminjaman dalam perpustakaan untuk jarak antar rak buku masih ada yang terlalu sempit, untuk jarak antar meja baca tidak

masalah meskipun tidak ada meja khusus untuk difabel yang duduk di kursi roda, untuk meja penelusuran/ OPAC mejanya terlalu tinggi dan sering mengalami kesulitan pada saat akan melakukan pencarian buku, mengenai meja layanan MPS (peminjaman mandiri) masih tinggi dan tidak bisa terjangkau saat akan menscan KTM ketika akan meminjam buku, namun untuk meletakkan bukunya masih terjangkau, dan mengenai meja sirkulasi untuk difabel yang duduk di kursi roda cukup tinggi dan tidak bisa melihat petugas, Petugas harus berdiri melayani difabel yang duduk di kursi roda jika mengembalikan buku terlambat, sarana aksesibilitas dari satu lantai menuju lantai berikutnya dalam gedung perpustakaan pada Perpustakaan UPI dinyatakan sangat menyulitkan. Para mahasiswa difabel yang duduk di kursi roda tergantung bantuan orang lain untuk menuju lantai atas, karena tidak disediakan lift yang dibuka untuk umum.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengembangan kebijakan layanan pada Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda ini dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia telah mengembangkan kebijakan layanan bagi penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda berdasarkan hasil analisa fasilitas. Namun ketersediaan informasi layanan, aksesibilitas menuju perpustakaan, aksesibilitas menuju/ antar ruang dalam perpustakaan, dan aksesibilitas fasilitas perpustakaan dan sarana layanan peminjaman dalam perpustakaan bagi pemustaka penyandang disabilitas

yang duduk di kursi roda belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda.

DAFTAR PUSTAKA

- Irvall, B., & Nielsen, G. S. (2005). *Access to Libraries for Persons with Disabilities- Checklist*. The Hague: IFLA. <http://www.ifla.org>
- Isrowiyanti, I. (2014). PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BAGI PEMUSTAKA DIFABEL DI PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA. *Pustakaloka*, 6(1), 77–90.
- Moleong, J. L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Riduwan. (2010). *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*. Alfabeta.
- Ridwan, Z. (2015). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities). *Fiat Justisia*, 7(2).
- Soleh, A. (2016). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), 107 (2011).
- Jovanca, D. P. (2009). *Kajian Aksesibilitas Lingkungan Fisik UPI Bagi Mahasiswa Tunanetra (Kajian Pada Gedung Pasca Sarjana, gedung Perpustakaan UPI, dan Jalan Utama*. SPs UPI.